

MEMBAWA KEADILAN BAGI IDENTITAS-DIRI ORANG PAPUA¹Stephanus Djunatan²***Abstract***

Bringing justice and peace to the Papuans would not be complete without the attention to any internal or private aspects of the Papuans. Efforts to improve the lives of the people of Papua such as building infrastructure facilities, education, health, security and law enforcement needs to be equipped with an appreciation of the fundamental aspects of the tribes in Papua and their culture. The fundamental aspect is the Papuans identity appreciation. This article intends to conceive how the identity appreciation of the Papuans should occur. Cultural and philosophical approach to the aspects of self-identity shows that the appreciation of the self-identity of the Papuan People is associated with the idea that everyone is existentially equal. We are not equivalent because of the legal aspects of such orders, not because of religious or advise it. Therefore, this paper is divided into three sections: the first section describes the philosophical-cultural approach to self-identity aspects. The second part initiate stigmatic stereotypes and perceptions that build ethnic identity in the archipelago, including the identity of the Papuans. The third discusses the appreciation of self-identity of the Papuans, which becomes a central issue for efforts in building prosperity or bringing justice and peace to the people of West Papua.

Keywords: *self-identity, ethnic identity, social justice, cultural violence, Papua*

¹ Makalah ini akan dipresentasikan dalam Seminar Internasional “**Bringing Justice And Peace To Papua: Assessment On Asymmetrical Local Autonomy, Communal Property Right On Land, And Conflict Resolution**”, yang diselenggarakan oleh **Centre For Public Policy And Management Studies (CPMS) Parahyangan Catholic University**, bekerja sama dengan **Majelis Rakyat Papua (MRP)**, Bandung 24 – 25 September 2013.

² Fakultas Filsafat/Lembaga Pengembangan Humaniora Universitas Katolik Parahyangan, e-mail : kejukornet@gmail.com

Pendahuluan

Setiap tahun, beberapa mahasiswa baru datang dari Papua untuk kuliah di universitas kami. Unit tempat kami bekerja diminta untuk mempersiapkan para mahasiswa baru asal Papua ini sebelum masa kuliah dimulai. Kesan kami, mahasiswa asal Papua masih harus mendapatkan banyak 'kursus tambahan' tentang teknologi informasi, seperti mengoperasikan komputer dan mengenali program-program sederhana pengolahan kata. Pengalaman berinteraksi bersama para mahasiswa baru ini memang tidak bisa dijadikan kesimpulan umum tentang kondisi pendidikan menengah di Papua. Tulisan ini juga bermaksud mengulas kondisi pendidikan di Papua. Pengalaman tersebut mengantar kita pada kenyataan tentang ketidaksetaraan pendidikan di antara orang Papua dengan suku-suku lainnya di nusantara. Kesempatan yang tak setara ini membawa kita pada pemahaman bahwa terdapat masalah keadilan sosial, bukan hanya antar daerah, tetapi juga antar identitas di nusantara ini.

Isu keadilan acap kali berkaitan dengan keterbatasan akses untuk mendapatkan fasilitas hidup di bidang perekonomian, sosial, politik, hukum, dan budaya. Tulisan ini akan berkonsentrasi kepada isu keadilan sosial dalam bidang budaya. Keadilan sosial dalam bidang ini mencakup topik-topik yang luas, di antaranya ialah topik mengenai identitas diri. Akses untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas identitas-diri dalam era global ini menjadi masalah yang tidak mudah dipecahkan. Amartya Sen (2006) dan Monica Duffy Toft (2003) menggaris bawahi bahwa isu identitas-diri etnik tidak bisa lagi diabaikan di era global. Identitas-diri yang setara seharusnya bisa diterima secara ideal. Tetapi, kenyataan di lapangan berbicara lain. Isu Identitas diri justru menjadi pintu masuk bagi agenda dan praktik diskriminasi, marginalisasi, opresi, bahkan eliminasi. Agenda dan praktik kekerasan tersebut bernuansa kultural, seperti yang ditegaskan Johan Galtung (1990). Artinya, isu kekerasan terhadap identitas kultural sering menjadi pemicu utama konflik antar identitas, yang tak jarang bermuara pada perang antar etnik, bahkan genosida.

Isu identitas-diri ini pula yang berpeluang besar menjadi alasan utama pemisahan satu kelompok etnik dari konteks negara dan bangsa (bdk. Toft 2003). Kita pun mengetahui bahwa proses pemisahan ini rentan dengan konflik berdarah dan sarat dengan pelanggaran hak azasi manusia. Oleh karena itulah, apresiasi identitas-diri etnik tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya yang bertujuan mengusahakan terjadinya keadilan sosial di nusantara ini. Tulisan dan presentasi ini disampaikan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan kita mengenai mendesaknya apresiasi identitas-diri etnis di nusantara. Khususnya, apresiasi ditujukan kepada identitas diri orang papua.

Wujud Identitas Diri genedis-kultural dan sosial

Amin Maalouf (2003), pemikir dan esais Perancis, berasal dari Lebanon, memahami identitas-diri seseorang bersumber pada dua hal. Pertama, kita memahami identitas-diri seperti yang diturunkan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Warisan identitas etnik ini mencakup pencirian budaya yang luas. Pencirian tersebut mencakup nama marga atau keluarga inti, tata krama, sistem nilai, pengetahuan, dan kepercayaan, ritual, adat istiadat. Singkatnya pencirian yang bersifat material sampai abstrak (konsepsional) diterima begitu saja sejak kita lahir. Dengan kata lain, setiap orang memiliki identifikasi kultur sejak ia lahir. Kita lahir sebagai warga etnik tertentu. Walaupun ilmu sosial kontemporer menyatakan identitas-diri etnik tersebut selalu merupakan hasil rekonstruksi berdasarkan kepentingan dan

agenda sosial, politik dan ekonomi, setiap orang tidak dapat lepas dari identitas-diri etnik yang diterimanya sejak lahir.

Penampilan fisik seringkali secara sederhana menunjukkan seseorang termasuk ke dalam identitas-diri etnik yang mana. Walaupun identifikasi rasial tersebut juga bagian dari upaya rekonstruksi identitas diri etnik, identifikasi seseorang berdasarkan penampilan wujud fisik dengan asalnya mau tidak mau menjadi hal yang berlaku baik bagi diri orang tersebut maupun bagi orang yang tidak termasuk etnik tersebut. Secara internal dan eksternal identifikasi turun temurun ini tidak dapat diabaikan mengingat tidak ada seorang pun lahir tanpa keterkaitan biologis atau genetis-kultural dengan nenek moyang atau leluhurnya.

Selain itu, keterkaitan genetis-kultural mengandaikan relasi timbal balik antara identitas diri, etnisitas yang dikonstruksi dengan tanah kelahiran (*homeland*). Dalam bukunya, Toft menunjukkan betapa kepemilikan tanah kelahiran tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang siapa dan orang mana seseorang. Jika pihak-pihak luar menguasai dan menduduki dan mengeksploitasi sebuah tanah kelahiran atau teritori tertentu, secara semena-mena penduduk setempat atau mereka yang beridentitas setempat tidak segan-segan memberi perlawanan, bahkan mengadakan perang. Konflik antar-suku yang terjadi dalam wilayah internal sebuah negara dapat berupa upaya mempertahankan tanah kelahiran. Dengan kata lain, hilangnya tanah kelahiran berimplikasi pada lunturnya pemahaman identitas diri orang-orang yang berasal dari tanah itu atau keturunan dari leluhur yang berasal dari tanah tersebut.

Kedua, kita memahami identitas diri kita berdasarkan keputusan untuk menentukan pencirian lain yang ingin 'kita pakai'. Ciri-ciri lain yang melengkapi identitas genetis-kultural ini berasal dari berbagai macam identitas diri pihak lain yang berada di sekitar kita. Dalam konteks masyarakat pluri-kultural, kita akan menjumpai berbagai macam wujud identitas dan mau tidak mau berinteraksi dengan orang-orang dengan latar belakang gaya hidup yang beragam. Interaksi itu mencakup proses asimilasi, atau adaptasi di antara beragam identitas-diri. Dengan kata lain, interaksi antar orang-orang dengan berbagai gaya hidup itu mengandaikan proses tukar menukar, dan proses memilih pencirian identitas mana yang akan melengkapi identitas genetis-kultural. Kita bisa memilih pencirian yang ingin kita kenakan, ibarat kita memilih pakaian yang cocok. Penentuan mana pencirian yang akan cocok, mana yang tidak, tentunya mencakup pula kondisi psikologis sehingga kita merasa nyaman dengan penyesuaian diri dengan pencirian yang baru. Kita dapat pula mencermati proses penyesuaian diri tersebut termasuk upaya perorangan atau kelompok mengadopsi berbagai unsur asing dalam rangka 'menjadi sama' dengan identitas sosial yang lebih kuat atau lemah.

Baik identifikasi genetis-kultural maupun identifikasi pencirian psiko-sosial berdasarkan pilihan membuat identitas-diri bersifat kompleks. Kompleksitas identitas diri menyiratkan kepentingan perorangan atau kelompok untuk 'menjadi bagian yang tak terpisahkan dari komunitasnya sendiri, atau komunitas yang lebih besar'. Demi kepentingan 'menjadi bagian tak terpisahkan tersebut, seseorang atau kelompok secara alamiah membutuhkan 'tempat untuk bermukim'. Kebutuhan tersebut bersifat eksistensial dan lagi-lagi berkaitan dengan keotentikan 'siapa saya' baik bagi diri seseorang maupun bagi interaksi atau hubungan sosial (Hardiman 2003:136). Tanpa tempat bermukim yang nyaman dan menjadi bagian dari rumah bermukim (atau tanah kelahiran), seseorang kehilangan rasa otentik melalui identitasnya-dirinya. Karena itulah, identitas-diri tidak hanya urutan keterangan dalam kartu pengenalan. Identitas-diri berkaitan dengan keberadaan diri kita yang khas dan unik. Kita mengalami keunikan diri bukan hanya karena kemanusiaan yang kita

terima secara alamiah, tetapi juga karena kita ini memiliki identifikasi genetik-kultural dan sosial yang kompleks.

Persepsi peyoratif terhadap Identitas Diri Orang Papua.

Kita tidak bisa melepaskan identitas-diri Orang Papua dengan tanah kelahiran mereka. Berdasarkan identifikasi genetik-kultural dan psiko-sosial, Orang Papua menerima keotentikan diri mereka baik dari leluhur mereka maupun dari pencirian psiko-sosial yang mengacu pada kemodernan melalui unsur-unsur budaya eksternal yang mereka terima. Kompleksitas identifikasi tersebut melahirkan pula keunikan identitas diri Orang Papua, dibandingkan suku-suku bangsa lainnya di nusantara.

Dalam konteks mengapresiasi keunikan identitas diri genetik-kultural dan psiko-sosial tersebut, kita perlu mencermati bagaimana konsepsi identitas-diri orang Papua direkonstruksi baik oleh orang Papua maupun oleh suku-suku lain di nusantara atau pihak eksternal. Konsepsi identitas-diri Orang Papua merupakan salah satu rekonstruksi dalam sejarah nusantara, yakni semenjak zaman kerajaan kuno, masa kolonisasi nusantara dan masa Indonesia merdeka. Kami belum menelusuri data mengenai bagaimana identitas Orang Papua dibentuk oleh orang Papua dan Non-Papua pada masa kerajaan-kerajaan kuno.³ Pada masa kolonisasi nusantara, pembentukan identitas-diri Orang Papua barangkali dapat ditinjau berdasarkan rekonstruksi pemerintah kolonial terhadap identitas etnik di nusantara. Pada masa kemerdekaan NKRI, rupa-rupanya ‘cara-cara’ pembentukan identitas etnik di nusantara ini tidak pernah beranjak dari model yang dibangun pemerintah kolonial.

Penelitian kami tentang kebijakan, agenda politik, dan praktik kekerasan terhadap Orang Tionghoa di nusantara mencermati ‘cara-cara’ Pemerintah Kolonial membangun identitas etnik di nusantara.⁴ Cara-cara yang struktural dan sistematis ini ‘berhasil’ membangun pola pikir diskriminatif dan represif di antara suku-suku di nusantara. Tujuannya agar suku-suku di nusantara ini diidentifikasi. Pemerintah Kolonial juga menetapkan batas-batas geografi dan teritori suku-suku nusantara bersamaan dengan identifikasi etnisitas komunitas-komunitas di nusantara. Klasifikasi suku-suku tersebut menempatkan pula mana suku yang menjadi anak emas, mana yang menjadi agen ekonomi-eksploitatif, mana yang menjadi budak, mana yang menjadi prajurit-penjaga kolonial (*watchdog*), dan lain sebagainya. Klasifikasi ini merupakan cara sistematis dan terstruktur yang dilakukan pemerintah kolonial agar nusantara ini tetap terpecah dan karena itu pula dikuasai dan sumber-sumber alamnya dieksploitasi. Barangkali kita dapat merujuk pada model klasifikasi warga negara Hindia Belanda dalam Aturan Negara Hindia Belanda (*Indische Staatsregelling*) tertanggal 2 September 1854, Ned S. 154-2, S. 1855-2 jo. 1.: Orang Eropa, Orang Timur Asing (India, Tionghoa dan Arab), dan Orang Pribumi. Klasifikasi yang diskriminatif, represif, dan eksploitatif ini melahirkan sekumpulan stereotip atau stigma identitas sosial yang cenderung negatif dan bernada permusuhan. Interaksi antar suku pun kemudian lebih kental diwarnai nuansa peyoratif daripada apresiatif. Dalam nuansa seperti itu pula, kita bisa mendeskripsikan

³ Dalam bentuk informasi yang sporadik, informasi tentang pembentukan identitas diri Orang Papua tersirat dalam bagaimana interaksi antar-kerajaan Kuno di Nusantara terjadi. Informasi tentang hal ini misalnya dapat dilihat di Denys Lombard, 200, vol. 2 (tentang pengaruh Cina dan Islam di Jawa dan Nusantara) dan 3 (pengaruh Hindu dan Budha dan masa pra-Hindu, Budha di Jawa dan Nusantara).

⁴ Penelitian ini saya lakukan bersama FX Rudi Setiawan S.Ag., MM. Beliau adalah kolega dosen di UNPAR. Penelitian kami berjudul “Penelusuran Akar-akar epistemologis Kekerasan dalam kasus Kekerasan terhadap Orang Tionghoa Indonesia”. Penelitian ini kami mulai tahun 2011, dan sekarang dalam tahap penyelesaian

bagaimana pembentukan identitas diri orang papua dibangun baik oleh orang papua sendiri dan pihak eksternal.⁵

Cara-cara Pemerintah Kolonial yang sistematis dan terstruktur dalam membangun identitas etnik 'rupa-rupanya' berhasil membangun persepsi stereotip dan stigmatik dalam lapisan bawah-sadar baik perorangan maupun kelompok etnik di nusantara ini justru setelah sejarah kolonisasi nusantara berakhir pada 1950. Memang pada masa kemerdekaan, klasifikasi ala pemerintah kolonial dihapus dan hukum kewarganegaraan juga berganti. Hanya saja kepentingan ekonomi dan kekuasaan di nusantara ini masih menggunakan cara-cara sistematis masa kolonial untuk memilah-milah identitas-diri warga negara nusantara. Istilah *pribumi* dan *non-pribumi* misalnya, merupakan klasifikasi warga negara yang diskriminatif dan represif di masa Orde Lama dan Baru. Klasifikasi tersebut baru bisa mencair waktu setelah digunakan lebih dari setengah abad. Kemudian perlahan-lahan klasifikasi tersebut melenyap dari kesadaran tentang etnisitas di nusantara pada masa kini. Kepentingan ekonomi dan politik pula yang rupa-rupanya membangun kelas kelas elit baru, yang diperebutkan dan diisi dengan identitas-diri etnik tertentu, entah secara perorangan entah secara pribadi. Dengan kata lain, nuansa diskriminatif, represif dan eksploitatif masih dipertontonkan dalam bentuk penggunaan stereotip dan stigma sosial untuk identitas-identitas etnik di nusantara. Tentu saja, kekerasan kultural semacam ini tidak sejalan dengan apresiasi identitas-diri seseorang sebagai unik dan sebagai hak azasi setiap orang.

Kekerasan kultural ini pun telah melahirkan pola pikir dan sikap pembiaran terhadap identitas-diri yang menjadi sasaran eksploitasi ekonomi dan diskriminasi politik di nusantara ini. Maksudnya, sementara sekelompok warga negara menikmati hasil-hasil pembangunan, sekelompok warga negara lainnya dengan identitas-diri tertentu rupa-rupanya tidak bisa menikmati kemajuan karena posisi mereka dalam kelas sosial-budaya yang 'rendah'. Sekelompok warga negara yang berhasil memiliki akses ini entah sengaja entah tidak membiarkan sekelompok warga negara lainnya dalam kondisi minim akses sosial ekonomi. Kelompok identitas-diri etnik lain 'dibiarkan' mengalami kondisi yang kurang dan mendapat stigma 'terbelakang'.

Dalam konteks 'pembiaran' itulah, kita bisa menyatakan bahwa identitas-diri orang papua dipandang sebagai kelompok-kelompok etnik yang mendapatkan stigma dan stereotipe: masyarakat yang kurang maju, masih terbelakang jika dipandang dari kemajuan budaya modern, masyarakat yang secara ekonomi berada di bawah standar kesejahteraan atau miskin, masyarakat yang masih menyelesaikan konflik dengan 'cara-cara' yang masih tradisional (perang antar-suku, atau tawuran) dan 'belum modern dan legal' (negosiasi, diplomasi, secara birokratis dan prosedural). 'Kenyataan hidup komunitas-komunitas etnik di Papua' yang diangkat melalui media rupa-rupanya semakin memperkuat persepsi stereotip dan stigmatik tentang identitas-diri orang papua. Tayangan-tayangan televisi rupa-rupanya memperkuat pandangan eksternal terhadap orang papua bahwa orang papua belum modern, belum sejahtera, bahkan belum sampai pada tahap 'beradab'.⁶ Sementara itu, kondisi pendidikan, infrastruktur, sarana dan prasarana sosial yang secara faktual berada di Papua rupa-rupanya turut menguatkan persepsi peyoratif terhadap identitas-diri orang papua.

Dengan kata lain, identitas-diri orang papua kental dengan nuansa peyoratif, yang berujung pada pandangan diskriminatif, represif, dan eksploitatif. Seakan-akan orang papua

⁵ Pernyataan terakhir ini perlu diverifikasi melalui penelitian sejarah dan antropologi tentang bagaimana identitas-diri Orang Papuadibentukpada masa kolonial oleh Pemerintah Kolonial.

⁶ Belum tentu persepsi stigmatik dan stereotipe ini juga diungkapkan komunitas-komunitas Papua sendiri.

memang 'tidak diperhitungkan' dalam agenda, kebijakan, program dan proyekproyek mensejahterakan masyarakat di nusantara ini. Jika pun muncul proyek-proyek pembangunan, apakah memang proyek-proyek tersebut menyejahterakan masyarakat papua atau hanya menjadi bagian dari eksploitasi sumber-sumber alam di Papua? Persepsi diskriminatif, represif, dan eksploitatif terhadap orang papua merupakan bentuk-bentuk konkret kekerasan kultural yang rupa-rupanya '*embedded*' atau menempel erat dengan pandangan dan sikap masyarakat non-Papua yang membiarkan semakin mendalamnya pandangan stereotipe dan stigmatik itu ditanam dalam kesadaran mereka.

Apresiasi Identitas Diri Orang Papua

Apresiasi identitas-diri orang papua mencakup dua level penting. Pada level permukaan, apresiasi ditujukan kepada perubahan persepsi. Dalam hal ini, persepsi stereotipe dan stigmatik terhadap orang papua mau tidak mau harus beralih ke nuansa yang konstruktif. Memang ini adalah bagian dari rekonstruksi politik dan budaya tentang persepsi identitas-diri orang papua. Pada gilirannya, rekonstruksi tersebut berkaitan dengan level kedua yang lebih dalam, yakni rekonstruksi paradigma berpikir dan bawah-sadar kita mengenai klasifikasi identitas-diri etnik, yang selama ini menjadi warisan pemerintah kolonial; dan kita terima begitu saja. Kita mau tidak mau harus mencermati bagaimana wacana klasifikasi warga negara yang berumur hampir dua abad ini sudah akrab bagi kita. Pikiran dan sikap kita seakan-akan membenarkan klasifikasi yang diskriminatif, represif dan eksploitatif tersebut. Penelitian yang kami lakukan menemukan betapa akar-akar epistemologis dan paradigmatis kekerasan kultural sudah demikian merasuk sehingga kita membenarkan dan membiarkan berbagai kebijakan, agenda, program dan proyek politik dan ekonomi yang mendiskriminasi, merepresi dan mengeksploitasi identitas-diri etnik-etnik yang dianggap marjinal. Perombakan persepsi stereotip dan stigma tentang 'kelas etnik-etnik pinggiran, rendah, dan terbelakang' harus dimulai dari dalam kita sebagai warga negara nusantara ini.

Selain perubahan cara pandang secara internal, apresiasi identitas-diri orang papua mencakup pula wilayah eksternal. Penelitian Toft mengingatkan kita agar tidak melepaskan identitas-diri dari tanah kelahiran (*homeland*). Sebagai sumber jati diri untuk identitas-diri kita, tanah kelahiran mengaitkan kita dengan leluhur secara genetis-kultural (bdk. Maalouf 2003). Berdasarkan keterkaitan eksistensial tersebut, kita harus memperhitungkan aspek tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri orang papua (juga berlaku untuk suku-suku lainnya). Kita tidak melihat unsur tanah kelahiran hanya sebagai hak milik atau sekian luas teritori yang kepemilikannya dikuasai dan dieksploitasi oleh sekelompok atau seseorang. Tanah kelahiran secara eksistensial menyediakan otentisitas identitas diri seseorang atau kelompok. Jika tanah kelahiran diabaikan, otentisitas identitas-diri menjadi tanpa makna apa pun. Dengan kata lain, mementingkan tanah kelahiran menjadi implikasi logis jika kita ingin mengapresiasi identitas-diri orang papua (dan suku-suku lainnya di nusantara).

Berkaitan dengan tanah kelahiran tersebut kita bisa bertanya apakah proses pembangunan selama ini di Papua sungguh-sungguh untuk kepentingan merawat tanah kelahiran di Papua dan mengembangkannya sesuai dengan kekhasan kultur orang papua? Jangan-jangan kita hanya mengamini dan mengadopsi begitu saja cara-cara kolonial. Maksudnya, penguasa kolonial hanya berpikir bagaimana membangun infrastruktur, sarana dan prasarana sosial hanya di daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Tujuannya untuk mendukung kepentingan eksploitatif dan keamanan para investor di daerah tersebut.

Pembangunan prasarana dan sarana keamanan di daerah tersebut bertujuan agar pasukan atau aparat keamanan dapat bergerak cepat untuk melindungi kepentingan investor dan eksploitor. Daerah lain yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam tidak akan disentuh, dan dibiarkan tetap dalam lingkaran sosio-kultural pinggiran dan dalam kondisi sosial yang marjinal dan secara ekonomi miskin. Semoga pembangunan di Papua sejak 1963 hingga kini bukan bertujuan untuk kepentingan eksploitatif dan penjagaan keamanan para investor; tetapi untuk melindungi dan mengapresiasi tanah kelahiran Orang Papua. Pentingnya mengapresiasi tanah kelahiran secara tersirat sudah disebut dalam UU no 5 tentang Pokok-Pokok Agraria tahun 1960. Undang-Undang tersebut sudah menempatkan masyarakat adat dengan hak ulayatnya sebagai ‘pemilik ketiga yang sah atas tanah kelahiran *homeland* (setelah bangsa Indonesia dan negara), baru kemudian pihak perorangan atau kelompok usaha dapat mengajukan hak milik atas tanah.⁷

Selain apresiasi tanah kelahiran, apresiasi identitas-diri orang papua dapat mengacu pada penggunaan kata-kata yang mengangkat harkat dan martabat orang papua. Penelitian kami menyoroti penggunaan pasangan kata yang cenderung mengekspresikan persepsi diskriminatif, represif dan eksploitatif; atau kata-kata yang berkonotasi kekerasan kultural. Pasangan kata-kata ini misalnya pribumi dan non-pribumi. Dalam kasus orang papua, kita bisa merujuk penggunaan pasangan ‘*modern – terbelakang*’. Pasangan kata ini menunjukkan bahwa orang papua hidup dalam kebudayaan yang terbelakang. Mereka belum (atau tidak) modern atau secara peyoratif disebut ‘primitif’. Labelisasi dan kategorisasi ‘terbelakang’ inilah yang menyebabkan mereka bisa diabaikan entah dalam negosiasi proyek-proyek pembangunan entah dalam pengambilan kebijakan tentang program pembangunan. Kemudian, pembangunan dan kesejahteraan hanya dinilai berdasarkan ukuran standar kemodernan menurut pihak atau institusi politik, ekonomi eksternal. Pembangunan dilakukan bukan berdasarkan ‘suara dan kebutuhan’ sesungguhnya dari masyarakat atau komunitas-komunitas di Papua. Ketika pemerintah atau pihak eksternal menyusun agenda dan melaksanakan praktik politik ekonomi berdasarkan kategorisasi peyoratif tersebut, pihak eksternal telah mewujudkan kekerasan kultural terhadap orang-orang papua berupa: diskriminasi, represi dan eksploitasi. Dengan kata lain, kita perlu mencermati penggunaan kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan siapa orang papua bagi masyarakat non-papua. Kata-kata yang cenderung mendiskreditkan harkat dan martabat orang papua tidak dapat lagi digunakan. Selain kata-kata, penayangan kehidupan orang papua melalui media audio-visual tidak lagi mencerminkan ‘keterbelakangan’ atau ‘ketertinggalan’. Penayangan yang berbau diskriminatif seperti menayangkan ‘betapa primitifnya’ orang papua harus kita cegah. Jika tayangan semacam itu terus menerus ditampilkan, masyarakat non-papua membentuk cara pandang yang diskriminatif tentang orang papua.

Penutup: Visi Konstruktif Identitas-diri Orang Papua

Bagaimana membawa keadilan dan perdamaian bagi masyarakat papua? tantangan ini menyangkut aspek fisik, psikis, sosial dan kultural. Secara fisik dan psikis bisa berangkat dari apresiasi pada identitas-diri orang papua. Persepsi dan pola pikir orang-orang papua sendiri dan orang-orang non-papua perlu mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan itu mencakup bagaimana membangun paradigma yang konstruktif tentang identitas-diri masyarakat papua. Secara sosial dan kultural, apresiasi identitas-diri orang papua tidak bisa lepas dari upaya melindungi dan tanah kelahiran dari eksploitasi sumber daya alam dan

⁷ Lihat penjelasan Boedi Harsono, 2003:24 tentang hirarki hak menguasai tanah dalam UUPA. Hirarki tersebut menyebutkan urutan hak penguasaan tanah berada di tangan [1] bangsa Indonesia, [2] negara, [3] masyarakat adat (atau disebut juga hak ulayat masyarakat hukum adat), [4] perorangan baik pribadi maupun perseroan.

politik represi yang menyudutkan masyarakat papua sedemikian rupa sehingga mereka menjadi kaum marjinal dan tertindas di tanahnya sendiri. Agenda dan praktik politik ekonomi yang bernuansa kolonial dan imperialistik jangan lagi diteruskan oleh para pemangku kebijakan publik, oleh para pengambil kebijakan di parlemen dan lembaga yudisial. Adalah tugas kita bersama mewujudkan kemerdekaan sesungguhnya di tanah kelahiran papua dan bagi orang-orang papua.

REFERENSI

Galtung, Johann, 1990, "Cultural Violence", *Journal of Peace Research*, Vol. 27. No. 3, (1990).

Hardiman, Franki Budi, 2003, *Heidegger dan Mistik Keseharian, suatu pengantar menuju Sein und Zeit*, Jakarta: KPG.

Harsono, Boedi, Prof., 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Lombard, Denys, 1990, *Le Carrefour Javanais, Essai d'histoire globale vol. II Les réseaux asiatiques*, Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales. Translated into Bahasa in 1996/2005, *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia*, volume II: Jaringan Asia, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Umum & Forum Jakarta – Paris, École Francais d'Extrême – Orient.

Lombard, Denys, 1990, *Le Carrefour Javanais, Essai d'histoire globale vol. III L'héritage des royaumes centriques*, Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, Translated into Bahasa in 1996/2005 *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia*, volume III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Umum & Forum Jakarta – Paris, École Francais d'Extrême – Orient.

Maalouf, Amin, 2003, *In the Name of Identity, violence and the need to belong*, NY: Penguin Books.

Sen, Amartya, 2006, *Identity and Violence, the illusion of destiny*, London & NY:WW

Norton & Company. Toft, Monica Duffy, 2003, *The Geography of Ethnic Violence: Identity, interest, and the indivisibility of territory*, Princeton: Princeton University Press.

